

JURNAL PRAXIS IDEALIS

Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan

VOL. 02 NO. 02 | 2025

DOI : [HTTPS://DOI.ORG/10.36859/JP.V2I2.4126](https://doi.org/10.36859/JP.V2I2.4126)

P-ISSN XXXX-XXXX E-ISSN XXXX-XXXX



Received : 25 Mei 2025

Accepted : 27 Juni 2025

Published : 30 Juni 2025

STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN STATUS DESA MENUJU DESA MANDIRI

**Joshua Pradeo Patria Saragih¹⁾, Atik Rochaeni²⁾, Dicky Febriansyah
Rokhmat³⁾**

1,2,3) Prodi atau Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Petatal dalam meningkatkan status desa menuju desa mandiri. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, serta studi dokumentasi terhadap berbagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Informan dalam penelitian ini meliputi kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (LPKK), serta perwakilan masyarakat yang terlibat aktif dalam proses pembangunan desa. Analisis strategi pembangunan Desa Petatal menggunakan pendekatan Geoff Mulgan yang mencakup lima dimensi, yaitu: tujuan, lingkungan, pengarahan, tindakan, dan pembelajaran. Pendekatan ini memberikan kerangka sistematis untuk memahami bagaimana strategi dijalankan secara partisipatif, terarah, dan berkelanjutan dalam konteks pemerintahan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Petatal berhasil meningkatkan status desanya dari desa berkembang menjadi desa mandiri. Strategi yang digunakan meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan, penguatan ekonomi lokal dengan mendukung UMKM, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan, tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Namun masih ditemukan tantangan seperti kurangnya fasilitas pendidikan, kurangnya infrastruktur kesehatan dan kurangnya aktifnya prasarana ekonomi. Namun keberhasilan strategi bergantung pada kolaborasi pemerintah desa, masyarakat, dan dukungan eksternal.

Kata Kunci: Strategi Pemerintah Desa, Desa Mandiri, Pemberdayaan Masyarakat, Desa Petatal.

Abstract

This study aims to analyze the strategies implemented by the Petatal Village Government in improving the village status towards an independent village. The research approach used is descriptive qualitative with data collection techniques through in-depth interviews, direct observation in the field, and documentation studies of various village development planning and implementation documents. Informants in this study include the village head, village officials, the Village Consultative Body (BPD), the Family Empowerment and Welfare Institution (LPKK), and community

representatives who are actively involved in the village development process. The analysis of the Petatal Village development strategy uses the Geoff Mulgan approach which includes five dimensions, namely: objectives, environment, direction, action, and learning. This approach provides a systematic framework for understanding how strategies are implemented in a participatory, directed, and sustainable manner in the context of village governance. The results of the study indicate that the Petatal Village Government has succeeded in improving its village status from a developing village to an independent village. The strategies used include increasing human resource capacity through training and education, strengthening the local economy by supporting MSMEs, building basic infrastructure such as roads and, more transparent and accountable governance. However, challenges remain, such as a lack of educational facilities, inadequate health infrastructure, and a lack of active economic infrastructure. The strategy's success depends on collaboration between village governments, communities, and external support.

Keywords: Village Government Strategy, Independent Village, Community Empowerment, Petatal Village.

PENDAHULUAN

Desa sebagai unit paling rendah tingkatannya dalam struktur pemerintahan Indonesia telah ada sejak dulu dan bukan terbentuk oleh Belanda. Awal sejarah terbentuknya desa diawali dengan terbentuknya kelompok masyarakat akibat sifat manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki dorongan kodrat atau kepentingan yang sama dari bahaya luar. Kapan awal pembentukan desa hingga sekarang sulit diketahui secara pasti. Tetapi ada bukti dalam prasasti Kawali di Jawa Barat pada akhir tahun 1350 M serta ditemukannya prasasti Walandit di Tengger, Jatim pada 1381 M. Desa sudah ada jauh sebelum penjajahan Belanda di Indonesia dimana penyelenggaranya didasarkan pada hukum adat. ([Sosiologiku.com](https://www.sosiologiku.com/sejarah-terbentuknya-desa-di-indonesia), <https://www.sosiologiku.com/sejarah-terbentuknya-desa-di-indonesia>, akses 15 Juni 2024).

Ada tiga unsur penting dalam sejarah terbentuknya desa, yaitu kepala desa, pamong desa, dan rapat desa. Kepala desa merupakan penguasa tunggal dalam pemerintahan desa yang bertugas menyelenggarakan urusan rumah tangga desa serta urusan yang berkaitan dengan pemerintah, dengan tetap memperhatikan pendapat masyarakat desa dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam menjalankan tugas tersebut, kepala desa dibantu oleh pamong desa yang penyebutannya dapat berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Selain itu, kepala desa juga perlu tunduk pada rapat desa untuk memutuskan hal-hal yang dianggap penting. ([Sosiologiku.com](https://www.sosiologiku.com/sejarah-terbentuknya-desa-di-indonesia),

<https://www.sosiologiku.com/sejarah-terbentuknya-desa-di-indonesia>,
akses 15 Juni 2024).

Perubahan Undang-Undang Desa, terutama sejak diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014, bertujuan membangun dan mendorong kemandirian desa. Undang-undang ini telah memberikan dampak signifikan dan progresif terhadap perkembangan desa, khususnya dalam aspek politik, ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Pemerintah menunjukkan komitmennya membangun desa melalui Astacita (RPJM 2025–2029) dengan memperkuat daerah dan desa untuk menurunkan kemiskinan. Melalui UU Desa No. 6 Tahun 2014, pemerintah menyalurkan dana desa dari APBN secara konsisten dan berkelanjutan, disertai fasilitasi, supervisi, serta pendampingan. Pendamping desa berperan penting dalam mendukung transformasi desa menjadi kreatif, mandiri, dan inovatif. Pembangunan perdesaan adalah elemen penting dalam pembangunan nasional.

Landasan teori dalam penelitian ini didasarkan pada berbagai konsep dan teori yang relevan dengan tujuan penelitian berikut diantaranya:

1. Pemerintahan Desa

Pemerintahan secara umum dapat dipahami sebagai suatu sistem atau proses pengelolaan negara oleh sekelompok orang yang diberikan kewenangan untuk membuat dan menjalankan kebijakan demi tercapainya tujuan bersama. Dalam pandangan ilmu administrasi negara, pemerintahan adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh badan eksekutif dalam suatu negara untuk melaksanakan hukum dan melayani masyarakat. Pemerintahan memiliki dua makna, yakni dalam arti luas yang mencakup semua lembaga negara, dan dalam arti sempit yang merujuk pada kekuasaan eksekutif saja. Pemerintahan dalam arti sempit adalah pelaksanaan fungsi eksekutif semata-mata. (Atmosudirdjo, 1986:15).

Konsep pemerintahan tidak hanya sebatas pada pelaksanaan fungsi negara, tetapi juga berkaitan erat dengan tata kelola (governance), akuntabilitas, partisipasi publik, dan efektivitas pelayanan. Dalam teori administrasi publik modern, pemerintahan dilihat sebagai

suatu entitas yang harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat, transparan dalam pengambilan keputusan, serta mampu membangun sistem koordinasi antar lembaga yang efisien. Pemerintahan idealnya mampu menjaga keseimbangan antara penggunaan wewenang dan pemberian layanan kepada masyarakat, dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip good governance. governance merupakan bentuk hubungan baru antara pemerintah dan warga yang bersifat kolaboratif serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat (Henry, 2007:87).

2. Status Desa dan Klasifikasi Desa

Pembangunan desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan dasar, pengelolaan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Desa Mandiri adalah desa yang memiliki pelayanan dasar memadai, infrastruktur baik, transportasi mudah, pelayanan publik berkualitas, dan pemerintahan efisien, dengan nilai Indeks Desa Mandiri IDM minimal 0,815 berdasarkan ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi. Untuk mewujudkan Desa Mandiri, diperlukan langkah strategis yang terencana dan terukur, dimulai dari optimalisasi pelaksanaan Undang-Undang Desa dengan paradigma pembangunan desa berkelanjutan.

3. Konsep Strategi

Secara etimologi, kata 'strategi' berasal dari bahasa Yunani, yaitu 'strategos' atau 'streteus', dengan bentuk jamaknya adalah 'strategi'. 'Strategos' itu sendiri berarti kepemimpinan militer atau tindakan yang dilakukan oleh para jenderal dalam merencanakan kemenangan dalam perang (Salusu, 2006:84). Sementara itu, menurut Handayani dan Sarwono (2021), strategi adalah proses yang dilakukan oleh para pemimpin puncak untuk menentukan rencana yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, diiringi dengan penyusunan cara atau upaya agar tujuan tersebut dapat tercapai. Sejalan dengan pendapat Jauch dan Glueck (Akdon, 2011:13), strategi diartikan sebagai rencana yang menyeluruh,

terpadu, dan terorganisir, yang menghubungkan keunggulan strategis organisasi dengan tantangan dari lingkungan, serta dirancang untuk memastikan pencapaian tujuan utama organisasi melalui pelaksanaan yang tepat. Oleh karena itu, strategi dapat dipahami sebagai perencanaan jangka panjang yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu.

4. Strategi Pemerintah Desa

Strategi Pemerintah Desa merupakan serangkaian rencana jangka pendek, menengah, dan panjang yang dirancang oleh pemerintah desa untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Strategi ini mencakup identifikasi masalah, perumusan kebijakan, pelaksanaan program, serta evaluasi dan pengawasan terhadap seluruh proses pembangunan desa. Dalam konteks otonomi daerah, strategi pemerintah desa harus disusun secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat, Badan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pihak-pihak terkait lainnya. Strategi ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya desa dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kemandirian desa, baik secara ekonomi, sosial, maupun administratif.

Keberhasilan strategi sangat ditentukan oleh sejauh mana perencanaan strategis mampu diterjemahkan ke dalam tindakan yang efektif dan berkelanjutan. Geoff Mulgan dalam *The Art of Public Strategy* (2009) menekankan bahwa strategi publik yang baik harus menyelaraskan tujuan, sumber daya, dan konteks lingkungan secara sistematis. Untuk itu, ukuran keberhasilan tidak hanya dilihat dari pelaksanaan administratif semata, tetapi juga dari kinerja strategis serta dampak nyata yang dihasilkan terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman ini menunjukkan lima faktor yang sangat penting untuk keberhasilan Strategi Pemerintahan Desa, yaitu: Tujuan, Lingkungan, Pengarahan, Tindakan, dan Pembelajaran.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang diterapkan untuk menyelidiki kondisi pada objek yang alami atau yang apa adanya, tanpa adanya manipulasi dari peneliti sehingga kondisi objek ketika peneliti memasuki dan setelah keluar tetap relatif tidak berubah (Sugiyono, 2013:8). Penelitian kualitatif menghasilkan data kualitatif yang mencakup ungkapan atau catatan dari individu tersebut atau perilakunya. Pemilihan model penelitian kualitatif ini dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, motivasi, dan tindakan, secara holistik (Moleong, 2006:6).

Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang "Strategi Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri di Desa Petatal. Metode kualitatif diterapkan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data yang mendalam atau data yang mengandung makna. Makna tersebut merupakan data yang sesungguhnya, data yang pasti, yang mencerminkan suatu nilai di balik data yang tampak.

PEMBAHASAN

Indeks Desa Membangun IDM adalah instrumen yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk mengukur kemandirian desa berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi atau lingkungan. IDM digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan desa yang lebih terarah dan berkeadilan. Melalui pengukuran ini, desa dapat dikategorikan menjadi lima status: desa sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri.

Berdasarkan data resmi tahun 2023, Desa Petatal, yang terletak di Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara, telah berhasil mencapai status sebagai Desa Mandiri. Pencapaian ini menunjukkan bahwa Desa Petatal memiliki kapasitas yang kuat dalam aspek sosial, ekonomi, serta lingkungan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran aktif pemerintah desa

dalam menyusun dan melaksanakan strategi pembangunan yang tepat sasaran, termasuk pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan desa, serta pemanfaatan Dana Desa secara akuntabel dan transparan.

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Status Desa Menuju Desa Mandiri, maka peneliti menggunakan operasionalisasi konsep strategi menurut Geoff Mulgan yang diterapkan dalam pemerintahan dengan 5 (Lima) komponen Tujuan, Lingkungan, Pengarahan, Tindakan, dan Pembelajaran. Jawaban dari setiap informan akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Tujuan

Dalam teori Geoff Mulgan, tujuan (purpose) merupakan fondasi utama dari setiap strategi inovatif, karena menjadi arah dan orientasi dari seluruh proses pembangunan. Tujuan berfungsi sebagai titik awal yang menentukan kemana strategi dan tindakan akan diarahkan. Dalam kerangka ini, strategi tidak hanya dibuat untuk memecahkan masalah jangka pendek, tetapi untuk mewujudkan perubahan jangka panjang yang bermakna dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perumusan tujuan harus dilakukan secara cermat, inklusif, dan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis peneliti dilapangan terkait dimensi tujuan, Pemerintah Desa Petatal memiliki visi mewujudkan desa mandiri, sejahtera, dan berdaya saing berbasis potensi lokal yang dijalankan secara partisipatif melalui koordinasi antara kepala desa, kepala dusun, BPD, dan masyarakat. Kepala dusun dan BPD berperan aktif sebagai penghubung serta pelaksana program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan warga, sementara kader PKK turut mendukung pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini melalui pendidikan di TK PKK secara sukarela. Perumusan tujuan pembangunan desa dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musdes), yang diawali dari pengumpulan aspirasi di tingkat dusun dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Proses ini menunjukkan komitmen pemerintah desa terhadap pembangunan berbasis

kebutuhan riil warga, dengan pelibatan aktif lembaga seperti LPKK, meskipun tidak semua aspirasi langsung direalisasikan.

2. Lingkungan

Strategi Pemerintah Desa Petatal dalam menuju desa mandiri dari aspek lingkungan menekankan pemanfaatan potensi lokal dan penyesuaian program dengan kondisi sosial, geografis, dan budaya desa. Melalui pemetaan lingkungan dan identifikasi tantangan seperti keterbatasan akses dan pelayanan dasar, pemerintah desa menyusun kebijakan yang berbasis data agar program pembangunan lebih inklusif, efektif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil analisis dan observasi peneliti terkait dimensi lingkungan. Desa Petatal memiliki potensi besar dalam sektor UMKM dan pertanian, didukung oleh letak strategis di jalur Lintas Sumatera Utara, semangat gotong royong, serta jiwa wirausaha generasi muda. Pemerintah desa bersama BPD terus mengoptimalkan potensi tersebut melalui pelatihan, pendampingan, pembentukan BUMDes, serta pemberdayaan masyarakat yang inklusif. Namun, desa juga menghadapi berbagai tantangan, baik internal seperti keterbatasan infrastruktur, lahan, dan akses modal, maupun eksternal seperti kebijakan pusat yang kurang sesuai, fluktuasi harga, dan cuaca ekstrem. Untuk mengatasinya, pemerintah desa terus mendorong pembangunan partisipatif, perbaikan infrastruktur, serta kebijakan yang memperkuat ketahanan ekonomi lokal.

3. Pengarahan

Pemerintah Desa Petatal menunjukkan praktik pengarahan yang efektif dan terstruktur melalui perumusan visi dan misi pembangunan dalam RPJMDes dan RKPDDes serta koordinasi rutin antara kepala desa, perangkat, dan lembaga desa. Pengarahan ini diperkuat oleh keterlibatan aktif masyarakat dalam musyawarah, sehingga pembangunan desa berlangsung secara partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan riil warga.

Berdasarkan hasil analisis dan observasi peneliti dilapangan Pemerintah Desa Petatal melaksanakan pembangunan berdasarkan

pedoman resmi seperti RPJMDes dan RKPDes yang disusun melalui musyawarah partisipatif bersama masyarakat dan lembaga desa. Struktur organisasi yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa, kepala dusun, BPD, dan PKK bekerja secara terintegrasi dalam mewujudkan visi desa mandiri, sejahtera, dan berdaya saing. Meski sinergi antar unsur pemerintahan desa telah terjalin baik, partisipasi masyarakat masih belum merata karena musyawarah sering didominasi oleh tokoh tertentu dan belum semua aspirasi warga diakomodasi. Oleh karena itu, pendekatan kritis dalam evaluasi kebijakan serta peningkatan komunikasi dan transparansi teknis pelaksanaan sangat penting untuk mendorong keterlibatan masyarakat secara lebih luas dan inklusif.

4. Tindakan

Strategi Pemerintah Desa Petatal dalam mewujudkan desa mandiri, jika ditinjau melalui teori tindakan Geoff Mulgan, menunjukkan integrasi antara peran sebagai pengambil keputusan dan fasilitator partisipasi masyarakat. Pendekatan ini tercermin dalam pemberdayaan UMKM, pelaksanaan musyawarah yang inklusif, serta kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan warga, sehingga menciptakan sinergi antara tindakan kolektif dan adaptasi terhadap dinamika sosial sebagai fondasi pembangunan desa yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, Pemerintah Desa Petatal telah melaksanakan berbagai program strategis secara bertahap untuk mendukung desa mandiri, terutama melalui pelatihan dan bantuan usaha bagi pelaku UMKM di bidang pengolahan makanan, kerajinan tangan, dan perdagangan. Program ini dinilai berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan warga, meskipun belum sepenuhnya merata, terutama bagi masyarakat di dusun terpencil. Pemerintah desa juga dinilai telah menjalankan prinsip transparansi melalui musyawarah, papan informasi, dan laporan kegiatan, sehingga membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Meskipun belum semua warga aktif, penyampaian

informasi tetap dilakukan secara terbuka dan memberikan ruang partisipatif dalam proses pembangunan.

5. Pembelajaran

Aspek pembelajaran dalam teori Geoff Mulgan menekankan bahwa proses pembangunan sosial yang berhasil harus didasarkan pada siklus refleksi, evaluasi, dan adaptasi secara terus-menerus. Artinya, setiap kebijakan dan program yang dijalankan tidak hanya berhenti pada pelaksanaan, tetapi juga harus diikuti dengan proses belajar yang aktif dari hasil dan dampaknya di masyarakat. Dalam konteks Desa Petatal, hal ini berarti bahwa pemerintah desa tidak cukup hanya merancang dan menjalankan program, seperti pengembangan infrastruktur ekonomi, pelatihan keterampilan, atau pemberdayaan kelompok masyarakat, tetapi juga harus secara rutin melakukan evaluasi terhadap capaian program-program tersebut.

Berdasarkan hasil analisis dan observasi peneliti terkait dimensi pembelajaran, Pemerintah Desa Petatal secara terbuka menerima masukan dan kritik dari masyarakat melalui musyawarah desa, forum dusun, maupun komunikasi langsung, yang kemudian dijadikan bahan evaluasi program. Proses evaluasi dilakukan secara berkala dan partisipatif dengan melibatkan berbagai elemen desa, termasuk perangkat desa, BPD, kepala dusun, organisasi kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat, untuk menilai capaian serta merumuskan perbaikan. Evaluasi ini memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pembangunan desa secara berkelanjutan menuju terwujudnya Desa Petatal yang mandiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Petatal dalam meningkatkan status desa menuju Desa Mandiri dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Strategi pemerintah desa dari dimensi tujuan, pembangunan Desa Petatal menunjukkan arah yang jelas melalui visi dan perencanaan dalam dokumen resmi desa, serta melibatkan masyarakat secara aktif, sehingga mendukung tercapainya desa mandiri secara terarah dan partisipatif.

- 2) Strategi pemerintah desa dari dimensi lingkungan mencakup pemanfaatan potensi sosial dan sumber daya alam untuk mendukung UMKM dan Pertanian. Namun, tantangan seperti keterbatasan lahan, kurangnya diversifikasi pangan, dominasi sawit, dan rendahnya partisipasi warga dusun terpencil memerlukan pendekatan strategis untuk pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
- 3) Strategi pemerintah desa dari dimensi pengarahan didasarkan pada perencanaan dan panduan yang melibatkan pejabat desa, BPD, dan masyarakat. Fokus kebijakannya mencakup penguatan ekonomi, tata kelola yang transparan, serta pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif, berbasis evaluasi, dan berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan.
- 4) Strategi pemerintah desa dari dimensi tindakan Pemerintah Desa Petatal menunjukkan komitmen kuat dalam melaksanakan program pembangunan menuju desa mandiri, seperti pelatihan, pembinaan UMKM, pembangunan infrastruktur, dan program sosial. Pelaksanaan ini mencerminkan implementasi nyata dan transparansi melalui keterlibatan aktif masyarakat.
- 5) Strategi pemerintah desa dari dimensi pembelajaran Desa Petatal dilakukan melalui evaluasi tahunan dan musyawarah desa, namun harus lebih diperkuat. Diperlukan penguatan umpan balik, dokumentasi praktik baik, dan partisipasi masyarakat agar proses evaluasi lebih berkelanjutan. Hal ini mencerminkan upaya refleksi, evaluasi, dan adaptasi untuk mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan responsif.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmosudirdjo, Prajudi. (1986). *Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Glueck, W. F., & Jauch, L. R. (1984). *Strategic Management and Business Policy*. New York: McGraw-Hill.
- Handayani, A., & Sarwono, A. E. (2021). *Buku Ajar Manajemen Strategis*. Surakarta: UNISRI Press.
- Henry, Nicholas. (2007). *Public Administration and Public Affairs*. New Jersey: Pearson Education.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulgan, G. (2009). *The Art of Public Strategy: Mobilizing Power and Knowledge for the Common Good*. New York: Oxford University Press Inc.

- Salusu, J. (2006). *Pengambilan Keputusan Strategis untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nirlaba*. Jakarta: Grasindo.
- Sugiyono, D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: Alfabeta.
- Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. (Sosiologiku.com, <https://www.sosiologiku.com/sejarah-terbentuknya-desa-di-indonesia>, akses 15 Juni 2024).